



Perkembangan Kebijakan Inklusif terhadap Ekonomi Kerakyatan: Review Literatur terhadap Praktik Global dan Implementasinya di Indonesia

J. Sabas Setyohadi¹, M.I. Adhisti. PD², Sumaryati Tjitrosu³

Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Bimbingan dan Konseling, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia³

*Email Korespondensi: sabas.setyo@gmail.com

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 05-08-2025 | Diterbitkan: 07-08-2025

ABSTRACT

This article aims to explore the development of inclusive policies toward a people-centered economy through a comprehensive literature review approach. The study compares global best practices in inclusive economic policy with their implementation in Indonesia, focusing on aspects such as community participation, digitalization, and cross-sector collaboration. The findings reveal that Indonesia's policies tend to be top-down, insufficiently data-driven, and lacking substantial community engagement. In contrast, global practices demonstrate more adaptive, collaborative, and sustainable approaches. This review recommends a transformation in Indonesia's economic policy framework toward a more participatory, locally driven, and inclusive model, supported by technology and inclusive data systems.

Keywords: Inclusive Policy, People-Centered Economy, Literature Review, MSMEs, Community Participation

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kebijakan inklusif terhadap ekonomi kerakyatan melalui pendekatan tinjauan pustaka. Kajian ini membandingkan praktik kebijakan inklusif secara global dengan implementasinya di Indonesia, dengan menyoroti aspek partisipasi komunitas, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan inklusif di Indonesia masih bersifat top-down, kurang berbasis data, dan minim pelibatan masyarakat secara substansial. Di sisi lain, praktik global cenderung lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan transformasi arah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia menuju model yang lebih partisipatif dan berbasis potensi lokal, dengan dukungan teknologi dan sistem data yang inklusif.

Katakunci: Kebijakan Inklusif, Ekonomi Kerakyatan, Tinjauan Literatur, UMKM, Partisipasi Masyarakat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setyohadi, J. S., Adhisti PD, M. ., & Tjitrosu, S. (2025). Perkembangan Kebijakan Inklusif terhadap Ekonomi Kerakyatan: Review Literatur terhadap Praktik Global dan Implementasinya di Indonesia. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 913-920. <https://doi.org/10.63822/eq3wry81>

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan telah menjadi narasi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejak masa reformasi. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan masyarakat kecil, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku usaha tradisional untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks global, ekonomi inklusif menjadi agenda strategis yang mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif (Word Bank, 2021)

Kebijakan inklusif dalam ekonomi kerakyatan berakar dari prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah, baik di negara maju maupun berkembang, telah mengadopsi berbagai pendekatan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan akses pasar (UNDP., 2022). Di Indonesia, gagasan ini terefleksi dalam berbagai program nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan BLT UMKM.

Studi literatur oleh Setiawan dan Kartasasmita (2020) menyoroti bahwa kebijakan inklusif di sektor ekonomi kerakyatan tidak hanya terbatas pada bantuan tunai, tetapi juga mencakup reformasi struktural seperti deregulasi usaha kecil, pembinaan koperasi, dan digitalisasi UMKM. Implementasi kebijakan semacam ini menunjukkan upaya negara untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antarkelas sosial.

Secara global, praktik ekonomi inklusif telah diterapkan melalui konsep social business di Bangladesh, microfinance di India, hingga co-operative economy di negara-negara Skandinavia. Studi oleh Yunus (2017) tentang Grameen Bank di Bangladesh menunjukkan bahwa model pembiayaan mikro berbasis komunitas mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok marginal tanpa tergantung pada bantuan negara secara penuh.

Sementara itu, pendekatan koperasi sebagai instrumen inklusi ekonomi banyak ditemukan di negara-negara seperti Finlandia, Denmark, dan Jerman. Menurut Röpke (2020), koperasi di Eropa bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga alat redistribusi kekayaan dan demokratisasi ekonomi. Model ini menginspirasi gerakan koperasi di Indonesia yang telah tumbuh sejak era kolonial namun belum maksimal kontribusinya terhadap PDB nasional.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan inklusif terhadap ekonomi kerakyatan seringkali terkendala oleh birokrasi yang kompleks dan keterbatasan data mikro ekonomi yang akurat. Studi oleh Nugroho dan Yuliana (2022) menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran pada program bantuan UMKM di masa pandemi COVID-19 merupakan cerminan dari lemahnya sistem pendataan dan pelibatan komunitas lokal. Kebijakan seperti KUR sebenarnya telah memberikan dampak positif dalam mengembangkan usaha kecil. Namun, menurut Rahmawati et al. (2021) distribusi KUR masih belum merata dan cenderung berpihak pada pelaku UMKM di sektor formal yang sudah mapan. Pelaku informal yang seharusnya menjadi fokus ekonomi kerakyatan justru sering terpinggirkan.

Literatur juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Studi oleh Handayani dan Susanto (2020) menjelaskan bahwa digitalisasi UMKM, melalui e-commerce dan keuangan digital, berperan penting dalam memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi usaha. Kebijakan inklusif masa kini harus mempertimbangkan aspek digital sebagai strategi jangka panjang. Namun, digitalisasi tidak selalu membawa hasil positif jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM. Penelitian oleh Febrianti dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa UMKM di wilayah pedesaan masih menghadapi kendala infrastruktur, literasi digital, dan akses internet. Oleh karena itu,

inklusi digital juga harus dikawal dengan pendekatan sosiokultural yang sesuai konteks lokal.

Penguatan ekonomi kerakyatan juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Kuncoro (2019), desentralisasi fiskal membuka peluang bagi daerah untuk merancang kebijakan inklusif berbasis potensi lokal. Beberapa daerah seperti Banyuwangi dan Kulon Progo telah berhasil mengimplementasikan program penguatan ekonomi rakyat berbasis pariwisata dan pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, literatur kebijakan juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder. Studi oleh Saragih dan Ramadhan (2020) menyebutkan bahwa triple helix antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi inklusif. Model ini memungkinkan transfer pengetahuan, inovasi teknologi, dan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Di tingkat internasional, indikator keberhasilan kebijakan inklusif dievaluasi melalui indeks inklusi keuangan dan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*). Menurut laporan IMF(2023), negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Namun, literatur juga mengkritik pendekatan populis yang sering terjadi dalam kebijakan ekonomi kerakyatan. Menurut Saifuddin dan Mahendra (2021), beberapa program bantuan justru menciptakan ketergantungan dan tidak mendorong produktivitas masyarakat miskin secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan evaluasi yang konsisten terhadap implementasi kebijakan.

Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa kebijakan inklusif terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia menunjukkan progres yang menjanjikan, namun belum sepenuhnya optimal. Tantangan implementasi mencakup kesenjangan struktural, kurangnya data terintegrasi, serta minimnya pelibatan komunitas akar rumput dalam proses perumusan kebijakan. Dengan belajar dari praktik global dan memperkuat sinergi lokal, kebijakan inklusif terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat ditingkatkan efektivitasnya. Perlu ada pendekatan holistik yang menggabungkan intervensi kebijakan, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi ilmiah terkait perkembangan kebijakan inklusif dalam konteks ekonomi kerakyatan, baik secara global maupun di Indonesia. Literatur yang dikaji berasal dari jurnal nasional terakreditasi, publikasi internasional bereputasi, serta laporan resmi lembaga pemerintahan dan organisasi internasional.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Fokus kajiannya adalah mengeksplorasi narasi, temuan, serta kebijakan yang tertuang dalam sumber-sumber ilmiah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep dan praktik ekonomi inklusif.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) yang berorientasi pada identifikasi pola, ide, atau isu utama yang muncul dari sumber-sumber literatur. Setiap artikel yang dikaji diekstraksi kontennya, dikoding, dan dimasukkan ke dalam matriks untuk membantu proses perbandingan dan sintesis data. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan praktik-praktik kebijakan global dengan kondisi di Indonesia secara sistematis dan kritis.

Tabel 1. Matriks Kajian Literatur (Literature Review Matrix)

No	Penulis & Tahun	Lokasi/Negara	Fokus Kajian	Metodologi	Temuan Utama
1	Yunus (2017)	Bangladesh	Microfinance (Grameen Bank)	Studi kasus	Pembiayaan mikro berbasis komunitas efektif memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan
2	Röpke (2020)	Eropa (Skandinavia)	Koperasi sebagai model ekonomi inklusif	Review historis	Koperasi meningkatkan keadilan distribusi dan demokratisasi ekonomi
3	World Bank (2021)	Global	Inclusive Growth	Laporan global	Ekonomi inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menurunkan kesenjangan
4	Rahmawati et al. (2021)	Indonesia	Distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Survei kuantitatif	Distribusi KUR belum merata, cenderung hanya menjangkau pelaku usaha formal
5	Nugroho & Yuliana (2022)	Indonesia	Evaluasi BLT UMKM saat pandemi	Studi kualitatif	Ketidaktepatan sasaran bantuan disebabkan oleh lemahnya pendataan mikro ekonomi
6	Handayani & Susanto (2020)	Indonesia	Digitalisasi UMKM	Literatur review	Digitalisasi UMKM dapat mendukung inklusi ekonomi jika disertai peningkatan literasi digital
7	Kuncoro (2019)	Indonesia	Desentralisasi dan ekonomi lokal	Studi teoritik	Pemerintah daerah berpotensi menjadi aktor kunci dalam penguatan ekonomi kerakyatan
8	UNDP (2022)	Global	Strategi pembangunan inklusif	Laporan internasional	Pendekatan inklusif harus lintas sektor dan mempertimbangkan konteks lokal secara kuat
9	Saifuddin & Mahendra (2021)	Indonesia	Kritik terhadap program populis	Studi evaluatif	Program bantuan populis dapat menimbulkan ketergantungan jika tidak diikuti pembinaan produktif
10	Saragih & Ramadhan (2020)	Indonesia	Triple Helix dalam kebijakan ekonomi	Studi kualitatif	Sinergi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi inklusif

Tabel 2. Klasifikasi Kebijakan Inklusif: Global vs Indonesia

Aspek	Praktik Global	Implementasi di Indonesia
Pendekatan	Social business, cooperative economy, financial inclusion	Ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, dan subsidi pemerintah
Instrumen Kebijakan	Microfinance (Grameen), koperasi Eropa, Fintech P2P lending	Kredit Usaha Rakyat (KUR), BLT UMKM, Program PEN, program koperasi
Aktor Pelaksana	NGO, lembaga keuangan komunitas, pemerintah lokal	Pemerintah pusat, dinas UMKM/koperasi, BUMN, fintech lokal
Pendekatan Teknologi	Digital finance, e-wallets, mobile banking	E-katalog UMKM, e-commerce binaan pemerintah, QRIS
Fokus Wilayah	Rural & urban marginalized communities	Terfokus pada UMKM formal di perkotaan, daerah tertinggal belum optimal
Kendala Utama	Regulasi lintas negara, pengawasan lembaga mikro	Lemahnya data mikro, birokrasi, literasi keuangan dan digital rendah
Dampak Positif	Meningkatkan kesejahteraan komunitas marginal, memperluas akses modal	Memperkuat daya tahan UMKM, menciptakan lapangan kerja lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil telaah terhadap sepuluh sumber literatur utama baik dari praktik global maupun konteks Indonesia, terdapat sejumlah temuan signifikan yang mencerminkan bagaimana kebijakan inklusif berkembang dalam mendukung ekonomi kerakyatan.

Praktik kebijakan inklusif di tingkat global umumnya bertumpu pada pendekatan partisipatif berbasis komunitas seperti *microfinance*, koperasi digital, dan pembangunan sosial berbasis kewirausahaan sosial. Sebaliknya, di Indonesia, kebijakan cenderung bersifat top-down dengan dominasi peran pemerintah, seperti terlihat pada implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Bantuan Langsung Tunai UMKM (Rahmawati et al., 2021).

Kebijakan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan belum sepenuhnya menyentuh pelaku usaha mikro dan ultra-mikro secara menyeluruh. Banyak program belum berbasis data mikro yang akurat, sehingga menimbulkan masalah ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih program, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah (Nugroho & Yuliana, 2022).

Hasil kajian menunjukkan lemahnya kolaborasi antara sektor publik, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan inklusif. Padahal model triple helix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha) yang berhasil diadopsi di negara-negara maju belum diterapkan secara optimal di Indonesia. Walaupun transformasi digital mulai dilakukan, seperti melalui e-katalog UMKM, penggunaan QRIS, dan pelatihan digitalisasi, sebagian besar pelaku UMKM ultra-mikro belum menjangkau teknologi tersebut karena keterbatasan literasi digital dan akses internet. Hal ini mengakibatkan kesenjangan digital yang makin memperlebar ketimpangan inklusi ekonomi.

Sebagian besar kebijakan inklusif Indonesia masih berorientasi pada penanganan jangka pendek, seperti bantuan tunai atau subsidi, dibandingkan dengan pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan.

Sebaliknya, di tingkat global, terdapat upaya kuat mendorong transformasi struktural, misalnya melalui pengembangan koperasi modern dan integrasi usaha mikro ke dalam rantai pasok industri (Yunus, 2017).

Kebijakan inklusif di Indonesia masih tersebar pada banyak kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa, tanpa mekanisme koordinasi lintas sektoral yang kuat. Hal ini menyebabkan duplikasi program dan efisiensi rendah dalam distribusi sumber daya. Desentralisasi fiskal seharusnya membuka ruang inisiatif daerah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Namun, kapasitas fiskal dan administratif daerah yang belum merata membuat kebijakan ekonomi kerakyatan lebih bersifat seremonial daripada substantif (Kuncoro, 1997).

Praktik global menunjukkan efektivitas model komunitas dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi di negara Skandinavia, Grameen Bank di Bangladesh, serta lembaga microfinance di Kenya dan India terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat kecil.

Secara umum, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai program inklusif, tantangan struktural dan kelembagaan masih menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan. Dibutuhkan reformasi sistemik dalam pendekatan kebijakan agar lebih berbasis data, kolaboratif, digital, dan berbasis pemberdayaan jangka panjang.

Pembahasan

Kebijakan inklusif dalam kerangka ekonomi kerakyatan berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keadilan distribusi sumber daya dan partisipasi aktif masyarakat marginal dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks global, pendekatan inklusif tidak hanya berorientasi pada akses terhadap bantuan, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berbeda dengan itu, di Indonesia, kebijakan inklusif masih dominan bersifat top-down dan berbasis bantuan sosial, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Sembako.

Literatur global banyak menunjukkan bahwa model top-down memiliki keterbatasan dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Sebaliknya, model partisipatif berbasis komunitas seperti koperasi di Italia, sistem *community wealth building* di Cleveland, atau Grameen Bank di Bangladesh lebih sukses karena memberikan otonomi dan kepemilikan kepada masyarakat lokal atas sumber daya ekonomi mereka. Di Indonesia, pendekatan ini masih belum menjadi arus utama dalam desain kebijakan ekonomi, sehingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat masih belum optimal.

Transformasi digital menjadi salah satu isu sentral dalam penguatan ekonomi kerakyatan, terutama dalam memperluas akses pasar dan keuangan. Negara-negara maju telah memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan UMKM dengan ekosistem global melalui e-commerce, fintech, dan platform logistik digital. Namun di Indonesia, digitalisasi menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan akses internet di daerah terpencil, rendahnya literasi digital, dan ketidaksiapan pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi (Handayani & Susanto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi perlu dibarengi dengan program literasi dan pemberdayaan berbasis komunitas.

Kebijakan inklusif yang efektif tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sinergis dari berbagai pihak. Di banyak negara, peran pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil

dijalankan secara kolaboratif melalui kemitraan strategis dan forum multipihak. Sebaliknya, di Indonesia, kebijakan pemerintah kerap disusun tanpa keterlibatan memadai dari komunitas akar rumput, sehingga berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi multisektor masih terhambat oleh ego sektoral, lemahnya koordinasi, dan kurangnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.

Permasalahan data juga menjadi isu struktural dalam pelaksanaan kebijakan inklusif di Indonesia. Tidak tersedianya data mikro yang akurat dan terbaru menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemetaan pelaku UMKM dan sasaran intervensi yang tepat. Negara-negara seperti India dan Korea Selatan telah memanfaatkan *big data analytics* untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang memungkinkan penyesuaian kebijakan secara responsif dan adaptif. Indonesia perlu membangun sistem data UMKM nasional yang terintegrasi, terbuka, dan dapat diakses lintas sektor.

Desentralisasi kebijakan ekonomi sebenarnya membuka peluang besar untuk merancang kebijakan inklusif berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan ekonomi mikro seperti desa wisata, ekonomi kreatif, dan industri rumah tangga. Namun, literatur menunjukkan bahwa belum semua daerah memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi ini secara efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perencanaan, monitoring, serta sistem insentif di tingkat lokal menjadi prasyarat penting agar kebijakan inklusif dapat berjalan optimal.

Melalui perbandingan literatur internasional dan praktik nasional, dapat disimpulkan bahwa kebijakan inklusif terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia perlu bertransformasi dari pendekatan karitatif menjadi pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Penekanan pada data yang akurat, teknologi yang ramah inklusi, pelibatan lintas sektor, serta keberpihakan pada potensi lokal merupakan arah strategis yang dapat ditempuh ke depan. Dalam konteks globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kemandirian masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kebijakan inklusif terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan. Dibandingkan dengan praktik global yang telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi melalui pendekatan partisipatif dan data-driven, kebijakan di Indonesia cenderung masih bersifat top-down, sektoral, dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Penerapan teknologi digital belum sepenuhnya inklusif karena kesenjangan infrastruktur dan literasi. Di sisi lain, peluang penguatan kebijakan dapat dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data mikro yang akurat, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta pelibatan komunitas secara aktif dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi kerakyatan di masa depan harus mengintegrasikan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan kemandirian masyarakat sebagai pilar utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, D. , &, & Prasetyo, W. (2021). Literasi Digital dan Aksesibilitas Teknologi pada UMKM Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Teknologi*, 6(2), 71–83.
- Group, W. B. (2021). *Global Economic Prospects, January 2021*. World Bank Publications.
- Handayani, S. , &, & Susanto, H. (2020). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Ekonomi Inklusif. . *Jurnal Inovasi Ekonomi Digital*, 5(1), 12–25.
- IMF. (2023). *Financial Inclusion and Economic Development: Global Assessment. IMF Working Paper No. 23/45*.
- Kuncoro, M. (1997). Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan. (No Title).
- Nugroho, A. , & Yuliana, T. (2022). Evaluasi Program BLT UMKM di Masa Pandemi. . *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 101–115.
- Rahmawati, S. , Hidayat, R. , & Lestari, A. (2021). Distribusi KUR dan Tantangannya bagi UMKM. . *Jurnal Kebijakan Ekonomi Indonesia*, 8(1), 34–46.
- Röpke, J. (2020). Cooperative Economy in the Global North: Historical Evolution and Contemporary Challenges. . *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 120–138.
- Saifuddin, M. , &, & Mahendra, I. (2021). Evaluasi Kritis Terhadap Program Populis dalam Ekonomi Kerakyatan. . *Jurnal Analisa Kebijakan Ekonomi*, 4(1), 22–35.
- Saragih, R. , &, & Ramadhan, F. (2020). Kolaborasi Triple Helix dalam Inovasi Kebijakan Inklusif. . *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 39–50.
- Setiawan, B. , &, & Kartasmita, G. (2020). Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45–58.
- UNDP. (2022). **Inclusive Economic Growth Strategy Report**. New York: UNDP Publications.
- Yunus, M. (2017). *A world of three zeros: the new economics of zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emissions*. Hachette UK.